

**TANGGUNG JAWAB PERDATA BIRO PERJALANAN WISATA DALAM
MENDATANGKAN WISATAWAN KE DAERAH TUJUAN WISATA
(Studi Pada Biro Perjalanan Wisata Di Kota Pontianak)**

**YULIANA MANGAN, SH.
A.21210059**

Abstract

Thesis, under the guidance of Prof. Dr. H. Garuda Wiko, SH., M.Si as Supervisor I and II Idham, SH., MH As mentors.

The thesis is entitled : **Civil Responsibility Travel Bureau In Bringing Travelers to Tourist Destination Areas (Studies in Travel Bureau in Pontianak)**. There are three main problems that diteiliti, namely regarding : the legal relationship between Travel Bureau with local government; legal relationship between the Traveler Travel Bureau/Consumer, and civil liability Travel Bureau Bureau Against Travelers. The research method used is a normative legal research methods and sociological. Conclusions derived from the results of this thesis are : 1. Legal relationships between Travel Bureau with views of the position of the local government and local government Travel Bureau in the implementation of tourism development, partnerships and coordinative in nature. 2. Legal relationships between Travel Bureau with travelers/Consumers essentially as a seller to the buyer tourist services tour services, also the relationship hukuma to do work or to perform services - services, which terkat the provisions of civil law and consumer protection laws. 3. Civil responsibility tanggung Travel Bureau Against Travelers bound by Article 1365 where one party is in default in carrying out tourism activities that have been agreed/agreed by both parties. In addition, it can also be sued for compensation, based on the consumer protection laws when traveling tour packages and tourist services not in accordance with the promised and/or breach of its obligations as a Consumer Travel Agents Travel Business Actor. Further recommended that future Pontianak City Government continuously improve programs, activities and tourism development angggaran good for tourism objects rehabilitate existing objects or build new tourist in town Pontinak. Similarly, the existing tourism businesses in the city of Pontianak in order to increase its role in developing tourism in the city of Pontianak, especially as related to the function of the tours they offer services to domestic tourists and mancanegara. To wider community, particularly the city of Pontianak and the surrounding areas, it is advisable to always pro-actively participate in the implementation of tourism development by participating maintaining cleanliness, security, public order, and the development of cultural values of the city of Pontianak.

Key Word : Civil Responsibility, Travel Bureau, Travelers, and Tourism Destination Region.

Abstrak

Tesis, dibawah bimbingan : Prof. Dr. H. Garuda Wiko, SH., M.Si selaku Pembimbing I dan Idham, SH., MH selaku Pembimbing II.

Tesis ini berjudul : **Tanggung Jawab Perdata Biro Perjalanan Wisata Dalam Mendatangkan Wisatawan Ke Daerah Tujuan Wisata (Studi Pada Biro Perjalanan Wisata Di Kota Pontianak).** Ada tiga masalah pokok yang diteliti, yaitu mengenai : Hubungan Hukum antara Biro Perjalanan Wisata dengan Pemerintah Daerah; Hubungan Hukum antara Biro Perjalanan Wisata dengan Wisatawan; dan Tanggung Jawab Perdata Biro Perjalanan Wisata Terhadap Wisatawan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan sosiologis. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian tesis ini adalah: 1. Hubungan Hukum Antara Biro Perjalanan Wisata Dengan Pemerintah Daerah dilihat dari kedudukan Pemerintah Daerah dan Biro Perjalanan Wisata dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan, hakikatnya bersifat kemitraan dan koordinatif. 2. Hubungan Hukum Antara Biro Perjalanan Wisata Dengan Wisatawan/Konsumen hakikatnya sebagai penjual jasa wisata dengan pembeli jasa wisata, juga merupakan hubungan hukuma untuk melakukan pekerjaan atau untuk melakukan jasa – jasa, yang terkat pada ketentuan hukum perdata dan undang-undang perlindungan konsumen. 3. Tangggung Jawab Perdata Biro Perjalanan Wisata terhadap Wisatawan terikat pada Pasal 1365 apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam melaksanakan kegiatan wisata yang sudah disepakati/diperjanjikan kedua belah pihak. Selain itu, juga dapat digugat tuntutan ganti rugi, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen apabila paket wisata dan pelayanan perjalanan wisatanya tidak sesuai dengan yang dijanjikan dan/atau melanggar kewajiban Biro Perjalanan Wisata sebagai Pelaku Usaha Perjalanan Wisata. Selanjutnya disarankan agar ke depan Pemerintah Kota Pontianak senantiasa meningkatkan program, kegiatan dan angggaran pembangunan kepariwisataan baik untuk merehabilitasi obyek-obyek wisata yang sudah ada ataupun membangun obyek-obyek wisata yang baru di Kota Pontianak. Demikian pula dengan pelaku usaha pariwisata yang ada di Kota Pontianak agar meningkatkan perannya dalam membangun kepariwisataan di Kota Pontianak, terutama yang terkait dengan fungsi pelayanan jasa wisata yang ditawarkannya kepada wisatawan domestik maupun mancanegara. Kepada masyarakat luas, khususnya warga Kota Pontianak dan sekitarnya, disarankan untuk senantiasa pro aktif berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan dengan ikut serta memelihara kebersihan, keamanan, ketertiban umum, dan pengembangan nilai-nilai budaya masyarakat Kota Pontianak.

Key Word : Tanggung Jawab Perdata, Biro Perjalanan Wisata, Wisatawan, dan Daerah Tujuan Wisata.

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 telah diatur Kepariwisata Indonesia yang diselenggarakan berdasarkan asas manfaat; kekeluargaan; adil dan merata; keseimbangan; kemandirian; kelestarian; partisipatif; berkelanjutan; demokratis; kesetaraan; dan kesatuan.

Karena itu Kepariwisata Indonesia diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi; kesejahteraan rakyat; menghapus kemiskinan; mengatasi pengangguran; melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya alam; memajukan kebudayaan; mengangkat citra bangsa; memupuk rasa cinta tanah air; memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan mempererat persahabatan antar bangsa.

Kepariwisata Indonesia juga diselenggarakan dengan prinsip-prinsip yaitu menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan; menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal; memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas; memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup; memberdayakan masyarakat setempat; menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara

pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan; mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Usaha pariwisata yang dapat dilakukan di seluruh Wilayah Indonesia meliputi daya tarik wisata; kawasan pariwisata; jasa transportasi wisata; **jasa perjalanan wisata**; jasa makanan dan minuman; penyediaan akomodasi; penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran; jasa informasi pariwisata; jasa konsultan pariwisata; jasa pramuwisata; wisata tirta; dan spa.¹

Usaha jasa perjalanan wisata yang selanjutnya disebut usaha pariwisata adalah penyelenggaraan Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata.² Sedangkan yang dimaksud dengan Biro Perjalanan Wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.³ Kemudian yang dimaksud dengan Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut dengan pengusaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata bidang usaha jasa perjalanan wisata.⁴

Terkait dengan kegiatan usaha pariwisata di Kota Pontianak terdapat

¹ Pasal 14, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang *Kepariwisataan*.

² Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.85/HK. 501/MKP/2010 Tentang *Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata*.

³ Pasal 1 Angka 3, *Ibid*.

⁴ Pasal 1 Angka 5, *Ibid*.

obyek-obyek wisata potensial untuk dikembangkan dan menarik minat Wisatawan Domestik maupun Mancanegara dalam berkunjung ke Kota Pontianak, yaitu **Tugu Khatulistiwa; Taman Alun Kapuas; Sungai Kapuas; Agribisnis Center; Kraton Kadariyah; Masjid Jami; Griya Kerajinan; Rumah Panjang atau Rumah Betang dan Museum Negeri.**⁵

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025, maka setiap Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengembangkan pembangunan daya tarik wisata di daerahnya dengan menyusun perencanaan pembangunan kepariwisataan yang meliputi **industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan kepariwisataan.**

Di Kota Pontianak sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Barat terdapat **125 Biro Perjalanan Wisata** terdiri dari 105 Biro Perjalanan Wisata yang telah terdaftar sebagai anggota Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Kota Pontianak, 19 Biro Perjalanan Wisata yang aktif **Outbound Tour Operator** dan 15 Biro Perjalanan Wisata yang aktif **Inbound Tour Operator.**⁶ Sungguhpun demikian, jika dicermati Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM. 85 /HK. 501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata, terdapat permasalahan hukum yang cukup prinsipil, yaitu **tidak diaturnya Tanggung Jawab**

⁵ Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pontianak, 2013.

⁶ Sumber : Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Kota Pontianak.

Perdata Biro Perjalanan Wisata dalam hal pengusaha Biro Perjalanan Wisata bersangkutan tidak “**memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan**”, sebagaimana dimaksud **Pasal 26 huruf d** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, bahwa setiap pengusaha pariwisata berkewajiban memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan.

Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, hanya menentukan **Sanksi Administratif** terhadap “Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 26 berupa : a. Teguran Tertulis; b. Pembatasan Kegiatan Usaha; dan c. Pembekuan Sementara Kegiatan Usaha.”⁷

Ketentuan tersebut menurut Peneliti sama sekali **tidak memberikan Perlindungan Hukum langsung kepada Wisatawan**. Timbul pertanyaan, bagaimanakah apabila Wisatawan merasa dirugikan secara material maupun immaterial atas tidak dipenuhinya kewajiban pengusaha Biro Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata?

Sehubungan dengan Permasalahan Hukum tersebut, Peneliti tertarik untuk mendalaminya melalui Penelitian Tesis dengan judul : **TANGGUNG JAWAB PERDATA BIRO PERJALANAN WISATA DALAM MENDATANGKAN WISATAWAN KE DAERAH TUJUAN WISATA (Studi Pada Biro Perjalanan Wisata Di Kota Pontianak).**

⁷ Teguran Tertulis, dikenakan kepada pengusaha paling banyak **3 (tiga)** kali. Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, dikenakan kepada pengusaha yang tidak mematuhi teguran tertulis sebanyak 3 kali. Sanksi Pembekuan Sementara Kegiatan Usaha, dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi Teguran Tertulis dan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha.

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Hubungan Hukum antara Biro Perjalanan Wisata Dengan Pemerintah Daerah?
2. Bagaimanakah Hubungan Hukum antara Biro Perjalanan Wisata Dengan Wisatawan/Konsumen?
3. Bagaimanakah Tanggung Jawab Perdata Biro Perjalanan Wisata terhadap Wisatawan?

Penelitian ini menggunakan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,⁸ melalui Studi Kepustakaan dan Metodologi Penelitian Sosiologis,⁹ melalui Studi Lapangan sebagai pelengkap, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan

1.1. Sumber Data :

- a. Bahan-bahan Hukum Primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah penelitian;

⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001, Hlm. 13-14); Soetandyo Wignjosoebroto, menyebutkan dengan istilah Metode Penelitian Hukum Doktrinal (Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, Editor : Ifdhal Kasim et.al., Elsam dan Huma, Jakarta, 2002, Hlm. 147); dan Ronny Hanitjo Soemitro (Almarhum), menyebutkan dengan istilah Metode Penelitian Hukum yang Normatif atau Metode Penelitian Hukum yang Doktrinal (Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, Hlm. 10).

⁹ Soekanto & Sri Mamuji, *Op. Cit.* Hlm. 14 : Penelitian Hukum Sosiologis atau Empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan Data Primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir Induktif dan Kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir.

- b. Bahan Hukum Sekunder berupa literatur-literatur Ilmu Hukum, hasil penelitian, dan dokumen resmi yang terkait dengan masalah penelitian;
- c. Bahan Hukum Tertier berupa kamus Hukum, kamus bahasa, kamus pemerintahan, dan dokumen tertulis lainnya.

1.2. Teknik Pengumpulan Data : dilakukan dengan cara menginventarisasi, mempelajari, mengkaji, dan mengaplikasikan konsep-konsep, asas-asas dan norma-norma hukum yang diperoleh dari bahan Hukum Primer, Sekunder dan Tertier ke substansi masalah penelitian.

1.3. Teknik Analisa Data : dilakukan dengan Metode Deskriptif Yuridis, melalui proses interpretasi, penalaran konseptual dan kontekstualitasnya dengan masalah yang diteliti.

2. Studi Lapangan :

2.1. Dilakukan dengan penetapan populasi dan sampel :

- a. Populasi terdiri dari : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pontianak, Biro Perjalanan Wisata Kalimantan Barat, dan Ketua Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Kota Pontianak.
- b. Sampel ditetapkan dengan Teknik *Purposive Sampling* (sampel bertujuan) terdiri atas :
 - 1) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pontianak.
 - 2) 5 Biro Perjalanan Wisata di Kota Pontianak.

3) 3 Orang dari Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Kota Pontianak.

1.2. Instrumen Penelitian menggunakan Kuesioner yang disusun dengan pertanyaan/jawaban terbuka.

1.3. Teknik Analisa Data : dilakukan dengan Metode Deskriptif Kualitatif.

BAB II

MASALAH

A. Konsepsi Kepariwisata

Menurut Yoeti, istilah pariwisata berasal dari kata “pari” yang artinya banyak dan “wisata” yang artinya perjalanan atau berpergian. Karena itu kata pariwisata dimaknakan sebagai “suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari satu tempat ke tempat lain, dengan maksud bukan untuk berusaha (*business*) atau mencari nafkah di tempat yang ia kunjungi, tetapi semata-mata untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam”.¹⁰ Yoeti, juga mengutip beberapa pendapat pakar pariwisata lainnya yang memaknakan pariwisata antara lain sebagai berikut:¹¹

- a. Hubbert Gulden, pariwisata adalah ”Suatu seni dari lalu lintas di mana manusia berdiam di suatu tempat asing untuk maksud tertentu, tetapi dengan kediamannya itu tidak boleh tinggal atau menetap untuk melakukan pekerjaan selama-lamanya atau meskipun sementara waktu, yang sifatnya masih berhubungan dengan pekerjaan”.
- b. Salah Wahab, pariwisata adalah “Suatu aktivitas manusia yang dilakukan secara sadar yang mendapatkan pelayanan secara bergantian di antara orang-orang dalam suatu negara itu sendiri ataupun di luar negeri meliputi pendiaman orang-orang dari daerah lain (suatu negara) untuk sementara waktu dalam mencari kepuasan yang beranekaragam

¹⁰ Oka A. Yoeti, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Op. Cit., Halaman 115-117.

¹¹ *Ibid.*

dan berbeda dengan apa yang dialami di tempat ia `memperoleh pekerjaan tetap”.

- c. Hunziker dan K. Krapf, pariwisata memberikan batasan yang bersifat teknis, mengatakan bahwa pariwisata adalah ”Keseluruhan dari gejala-gejala yang ditimbulkan oleh perjalanan dan pendiaman orang-orang asing serta penyediaan tempat tinggal sementara asalkan pendiaman itu tidak tinggal menetap dan tidak memperoleh penghasilan dari aktivitas yang sifatnya sementara tersebut”.

Pengertian tentang pariwisata di atas, hakikatnya tidak berbeda secara prinsipil dengan pengertian pariwisata yang diformulasikan dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, yang menormatiskan “Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah”.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan memaknakan “Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Kemudian yang dimaksud dengan “Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata”.¹²

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

¹² Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.

10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata “Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan”. Dapat juga dimaknakan, daya tarik wisata ditentukan oleh daya tarik obyek dan atraksi wisata.

Obyek dan atraksi wisata ini tentunya berada di daerah tujuan wisata. Berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, yang dimaksud dengan “Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan”.

Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.¹³ Usaha pariwisata meliputi antara lain daya tarik wisata; kawasan pariwisata; jasa transportasi wisata; **jasa perjalanan wisata**; jasa makanan dan minuman; penyediaan akomodasi; penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran; jasa informasi pariwisata; jasa konsultan pariwisata; jasa pramuwisata; wisata tirta; dan spa.¹⁴

Kemudian yang dimaksud dengan Biro Perjalanan Wisata adalah

¹³ Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang *Kepariwisata*.

¹⁴ Pasal 14 Ayat (1).

usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.¹⁵

Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, memformulasikan “Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata”.

Senada dengan batasan di atas Kusudianto mendefinisikan industri pariwisata sebagai suatu “susunan organisasi, baik pemerintah maupun swasta yang terkait dalam pengembangan, produksi dan pemasaran produk suatu layanan yang memenuhi kebutuhan dari orang yang sedang bepergian”.¹⁶ Perlu ditegaskan, menurut Soekadijo,¹⁷ industri pariwisata tidaklah identik dengan industri dalam arti ekonomis. Sebab, industri pariwisata meliputi pula industri-industri lain, seperti industri perhotelan, industri rumah makan, industri kerajinan/cendera mata, industri perjalanan dan sebagainya.

Berikutnya Muljadi mendefinisikan¹⁸ “produk wisata adalah suatu bentukan yang nyata dan tidak nyata, dalam suatu kesatuan rangkaian perjalanan yang hanya dapat dinikmati apabila seluruh rangkaian perjalanan tersebut dapat memberikan pengalaman yang baik bagi yang

¹⁵ Pasal 1 Angka 3, Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM. 85/HK.501/MKP/2010 Tentang *Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata*.

¹⁶ Kusudianto Hadinoto, *Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata*, UI Press, Jakarta, 1996, Halaman 11.

¹⁷ R.G. Soekadijo S. *Anatomi Pariwisata (Memahami Pariwisata sebagai Systemic Linkage)*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Umum, 2000, Halaman 29.

¹⁸ A.J. Mulyadi, *Op. Cit.*, Halaman 46.

melakukan perjalanan tersebut”.

Prasarana dan sarana pariwisata merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam pembangunan kepariwisataan. Meskipun daerah tujuan wisata memiliki obyek-obyek wisata yang menarik, namun jika tidak memiliki sarana dan prasarana wisata yang memadai untuk diakses, maka daerah tujuan wisata itu tidak akan mendapatkan banyak kunjungan Wisatawan Mancanegara.

Menurut Muljadi, yang dimaksud prasarana kepariwisataan adalah semua fasilitas yang mendukung agar sarana pariwisata dapat hidup dan berkembang serta dapat memberikan pelayanan kepada wisatawan guna memenuhi kebutuhan mereka yang beraneka ragam, antara lain :¹⁹

- a. Prasarana perhubungan, seperti jaringan jalan raya dan jaringan rel kereta api, bandara, pelabuhan laut, terminal angkutan darat dan stasiun kereta api;
- b. Instalasi tenaga listrik dan instalasi penjernihan air bersih;
- c. Sistem pengairan untuk keperluan pertanian, peternakan, dan perkebunan;
- d. Sistem perbankan dan moneter;
- e. Sistem telekomunikasi, seperti telepon, internet, pos, televisi, dan radio;
- f. Pelayanan kesehatan dan keamanan.

Sedangkan yang dimaksud dengan sarana kepariwisataan adalah

¹⁹ *Ibid*, Halaman 13.

perusahaan-perusahaan yang memberikan pelayanan kepada wisatawan, baik secara langsung atau tidak langsung bagi kelangsungan hidupnya, tergantung dari wisatawan yang datang. Jenis-jenis sarana pokok pariwisata antara lain adalah Perusahaan perjalanan (*Travel Agent* atau Biro Perjalanan Wisata); Perusahaan angkutan wisata; Perusahaan akomodasi; Perusahaan makanan dan minuman; Perusahaan daya tarik wisata dan hiburan; Perusahaan cinderamata atau *art shops*. Selain prasarana dan sarana di atas, Wisatawan juga sangat membutuhkan industri pendukung pariwisata antara lain seperti bank/ATM, money changer, kantor pos, rumah sakit, warung telepon, supermarket, fasilitas umum, dan lain-lain.²⁰

B. Eksistensi Biro Perjalanan Wisata

1. Tinjauan Historis

Menurut penjelasan **Sri Endah Nurhidayati**,²¹ pada awalnya kegiatan perjalanan berkembang karena adanya kebutuhan manusia untuk bertahan hidup. Semula perjalanan bertujuan memperluas jaringan perdagangan yang terkait erat dengan ragam/variasi produk yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Aspek lainnya berkaitan dengan keinginan untuk menaklukkan/memperluas daerah jajahan. Ketika populasi makin meningkat maka kebutuhan kelompok masyarakat juga meningkat. Hal ini mendorong kelompok berusaha memenuhi kebutuhan anggotanya dengan melakukan ekspansi (perluasan) daerah jajahan ke wilayah lain yang potensial.

²⁰ *Ibid.*

²¹ endah-parwis-.web.unair.ac.id/artikel_detail-7008 *Sejarah Perkembangan Pariwisata*, Unair, 26 Desember 2012, Diakses 5 Mei 2013.

Tahun 1882 Ward G. Foster mendirikan **Biro Perjalanan Wisata pertama di Amerika**. Ia juga membuka toko cinderamata dan hotel resort di Florida dan berkembang pesat. Namun Tahun 1980-an Biro Perjalanan Wisata tersebut diambil alih Carlson Travel Group dan mengganti nama menjadi Carlson.

Di **Indonesia**, **Biro Perjalanan Wisata yang pertama** didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada **Tahun 1926 di Jakarta** bernama **Lissone Lindeman (LISLIND)**. Kemudian pada Tahun 1936 LISLIND ini diubah namanya menjadi **Nederland Indische Touristen Bureau (NITOUR)**.

2. Klasifikasi Perusahaan Perjalanan

Bentuk kelas/klasifikasi perusahaan perjalanan berinduk kepada fungsi dari perusahaan perjalanan itu sendiri. Adapun fungsi perusahaan perjalanan itu adalah :

- a. Organizer, yang terdiri dari wholesaler dan retail tour operator;
- b. Intermediary, terdiri dari kelas mediator dan representatif. Atau intermediary ini dalam perusahaan penerbangan disebut dengan istilah General Sales Agent (GSA), Sales Agent (SA) dan Sub Agent.

Menurut luasnya, Biro Perjalanan Wisata, dapat dibagi ke dalam :

- a. Biro Perjalanan Wisata yang berdiri sendiri, dengan demikian berarti Biro Perjalanan Wisata ini tidak mempunyai kantor cabang.
- b. Biro Perjalanan Wisata dengan kantor cabang, yang terdiri dari kantor pusat dan beberapa kantor cabang .

Kantor cabang merupakan unit yang letaknya terpisah dari kantor pusat.

Tujuan pendirian kantor cabang adalah untuk memperluas jangkauan usaha dan aktivitas usaha. Kantor cabang merupakan perluasan usaha dari kantor pusat dan tidak merupakan perusahaan yang berbeda, karenanya kantor cabang mempunyai nama yang sama dengan kantor pusatnya.

Dalam bisnis Biro Perjalanan Wisata, dikenal dua jenis kantor cabang, yaitu :

- a. Kantor Cabang Aktif, mempunyai kegiatan yang berbeda dengan Kantor pusatnya, disamping juga tetap berusaha sebagai sales agent dan handling agent bagi kantor pusatnya.
- b. Kantor Cabang Pasif, mempunyai kegiatan usaha yang sama dengan kantor pusatnya. Dalam hal ini Kantor cabang benar-benar hanya menjadi sales agent dan handling agent dari produk Kantor pusatnya.

Untuk mendirikan kantor cabang Biro Perjalanan Wisata, izin usaha pariwisatanya cukup dimiliki oleh kantor pusat saja. Untuk kantor cabang sendiri tidak perlu mengajukan izin tersendiri.

Menurut jangkauan usaha penjualan, ada Biro Perjalanan Wisata baik organizer ataupun intermediary yang mendirikan Kantor Penjualan (Sales Office), selain penjualan di kantor sendiri. Tujuan pendirian kantor penjualan ini adalah untuk memperluas jangkauan usaha penjualan dari produk Biro Perjalanan Wisata. Tempat kantor penjualan ini dapat didirikan untuk kepentingan usaha Biro Perjalanan Wisata yang berdiri sendiri ataupun untuk kantor cabang, tetapi persyaratannya harus berada dalam kota yang sama. Kantor penjualan hanya boleh melakukan Memberikan informasi tentang produk

yang dijual oleh kantor yang membuka sales office tersebut; Menyampaikan pesanan (permintaan pelayanan dari wisatawan/konsumen) kepada kantor yang membuka sales office tersebut; Atas nama kantor yang membuka sales office, menyampaikan tiket atau pesanan lainnya kepada Wisatawan dan menerima pembayarannya; agen kantor penjualan adalah Agen Perjalanan Wisata kegiatan penjualan, bukan perusahaan usaha Biro Perjalanan Wisata.

Kantor Penjualan tidak di perbolehkan Mengadakan hubungan usaha langsung dengan pihak ke tiga tanpa melalui Biro Perjalanan Wisata yang membuka sales office tersebut; Menyelenggarakan tour dengan memungut biaya tour dan biaya pelayanan lainnya kecuali atas nama Biro Perjalanan Wisata yang membuka sales office tersebut.

3. Organisasi Biro Perjalanan Wisata

Pada saat ini susunan organisasi Biro Perjalanan Wisata yang berbentuk Perseroan Terbatas telah menyesuaikan diri dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

4. Aktivitas Usaha Pokok Biro Perjalanan Wisata

Pelayanan yang diberikan Biro Perjalanan Wisata pada umumnya digolongkan atas : a. Pelayanan menuju tempat tujuan; b. Pelayanan di tempat tujuan. Menurut prakteknya terdapat penggolongan aktivitas Biro Perjalanan Wisata, antara lain sebagai berikut :²²

- a. Informasi Perjalanan
- b. Memberikan Saran Program Perjalanan Wisata

²² Hasil Wawancara Peneliti Dengan Responden Penelitian ini.

- c. Menjual Tiket Perjalanan Wisata
- d. Mengurus Akomodasi Perjalanan Wisata
- e. Pengurusan Perjalanan Wisata (Leisure)

BAB III

PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian terhadap data sekunder Rencana Program Dan Kegiatan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Pontianak dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak diperoleh data sebagai berikut :

Data obyek wisata unggulan di Kota Pontianak sampai tahun 2011 dapat di lihat pada Tabel : 1.

Tabel : 1
Daya Tarik Wisata Unggulan Di Kota Pontianak
Data Per 31 Desember Tahun 2011

NO	DAYA TARIK WISATA	JUMLAH	KETERANGAN
1	Tugu Khatulistiwa	1	
2	Keraton Kadariyah	1	
3	Agribisnis Center	1	
4	Taman Alun Kapuas	1	
	JUMLAH	4	

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pontianak.

Selanjutnya usaha jasa pariwisata, usaha obyek dan daya tarik wisata dapat dilihat dalam Tabel : 2 dan Tabel : 3 di bawah ini :

Tabel : 2
Usaha Jasa Pariwisata Di Kota Pontianak
Data Per 31 Desember Tahun 2011

NO	JENIS USAHA	JUMLAH	KETERANGAN
1	Biro Perjalanan Wisata	125	

2	Agen Perjalanan Wisata	46	
3	Cabang Biro Perjalanan Wisata	3	
4	Jasa Impresariat	25	
	JUMLAH	199	

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pontianak.

Tabel : 3

Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata Di Kota Pontianak

Data Per 31 Desember Tahun 2011

No	JENIS USAHA	JUMLAH	KETERANGAN
1	Taman Rekreasi	2	
2	Bioskop	1	
3	Karaoke	18	
4	Diskotik	2	
5	Panti Pijat	21	
6	Salon Kecantikan	51	
7	Permainan Ketangkasan	6	
8	Billiard	10	
9	Penyewaan Video Cassette	8	
10	Fitness Centre	8	
11	Sarana dan Fasilitas Olah Raga	5	
12	Café	23	
	JUMLAH	155	

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pontianak.

Sedangkan Usaha Sarana Pariwisata Di Kota Pontianak Data Per 31

Desember Tahun 2011 disajikan dalam Tabel : 5.

Tabel : 5

Usaha Sarana Pariwisata Di Kota Pontianak

Data Per 31 Desember Tahun 2011

No	JENIS USAHA	JUMLAH	KETERANGAN
1	Hotel	48	
2	Rumah Kost	56	
3	Restoran	52	
4	Rumah Makan	167	
5	Warung Kopi	63	
6	Jasa Boga/Catering	28	
	JUMLAH	364	

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pontianak.

Perkembangan kunjungan wisatawan di Kota Pontianak sejak tahun 2008-2012 senantiasa meningkat sebagaimana disajikan dalam Tabel : 6 dan jumlah kunjungan ke Tugu Khatulistiwa Pontianak ditampilkan pada Tabel 7.

Tabel : 6

Perkembangan Kunjungan Wisatawan di Kota Pontianak

Tahun 2008-2012

Tahun	Jumlah Wisatawan		Total	Kenaikan %
	Nusantara	Mancanegara		
2008	248.906	18.854	267.760	-
2009	294.338	15.892	310.230	15,86 %
2010	420.180	14.061	434.241	42,470 %
2011	672.306	22.780	695.086	60,07 %
2012	840.382	28.475	868.857	80,00 %

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pontianak.

Tabel : 7

Jumlah Pengunjung Wisatawan Tugu Khatulistiwa Pontianak

Tahun 2008-2012

Tahun	Jumlah Wisatawan		Total	Keterangan
	Nusantara	Mancanegara		
2008	35.190	4.079	39.269	
2009	43.017	4.452	47.469	
2010	57.987	5.156	63.143	
2011	70.107	5.708	75.815	
2012	74.393	6.325	80.718	

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pontianak.

Untuk mengetahui bagaimana wujud hubungan hukum antara Biro Perjalanan Wisata Dengan Pemerintah Daerah, perlu dipahami tentang kedudukan Pemerintah Daerah, Biro Perjalanan Wisata dan Kedudukan Biro Perjalanan Wisata dalam Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA), terjemahan : Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) Kota Pontianak dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan :

1. Kedudukan Pemerintah Daerah dan Biro Perjalanan Wisata

Melalui hasil penelitian terhadap substansi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata dan hasil wawancara Peneliti dengan responden penelitian ini, maka dapat diketahui hubungan hukum antara **Biro Perjalanan Wisata dengan Pemerintah**

Daerah hakikatnya bersifat **kemitraan dan koordinatif**. Kenyataan ini dapat diketahui dari kedudukan Pemerintah Daerah sebagai badan hukum publik yang berfungsi sebagai **regulator, administrator** dan **fasilitator** penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan. Sedangkan Biro Perjalanan Wisata merupakan Badan Usaha dan Badan Hukum Privat yang mendapatkan Izin Usaha Pariwisata dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan usaha perjalanan wisata.

Demikian pula dengan Pemerintah Kota Pontianak, berwenang : menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kota; menetapkan destinasi pariwisata kota; menetapkan daya tarik wisata kota; melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata; mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya; memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya; memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru; menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kota; memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya; menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

2. Kedudukan Biro Perjalanan Wisata dalam Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) Kota Pontianak sebagai Salah Satu Unsur Badan Promosi Pariwisata Daerah

Berdasarkan Pasal 36 sampai Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata diatur eksistensi **Badan Promosi Pariwisata Indonesia** dan **Badan Promosi Pariwisata Daerah**. Salah satu unsur

keanggotaan Badan Promosi Pariwisata Indonesia dan Badan Promosi Pariwisata Daerah adalah **Assosiasi Wisata** yang terhimpun dalam **Assosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) Kota Pontianak**.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan deskripsi teoretik yang relevan, deskripsi hasil penelitian dan deskripsi analisis hasil penelitian tesis ini, maka Peneliti mengemukakan kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Hubungan Hukum Antara Biro Perjalanan Wisata Dengan Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Kota Pontianak dilihat dari kedudukan Pemerintah Daerah dan Biro Perjalanan Wisata dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan, hakikatnya bersifat **kemitraan** dan **koordinatif**. Di mana Pemerintah Daerah sebagai Badan Hukum Publik yang berfungsi sebagai **regulator**, **administrator** dan **fasilitator** penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan. Sedangkan Biro Perjalanan Wisata merupakan Badan Usaha dan Badan Hukum Privat yang mendapatkan Izin Usaha Pariwisata dari Pemerintah Daerah (Pemerintah Kota Pontianak) untuk melaksanakan usaha pariwisata.
2. Hubungan Hukum Antara Biro Perjalanan Wisata Dengan Wisatawan/Konsumen hakikatnya sebagai **penjual jasa wisata** dengan **pembeli jasa wisata**. Karena itu, apabila terjadi cacat hukum (wanprestasi) dalam transaksi tersebut, berlaku ketentuan Hukum Perdata dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu dilihat dari aspek Hukum Perjanjian, pemesanan paket wisata oleh Wisatawan melalui pengisian lembaran penawaran (*leaflet*) paket wisata, dan transaksi elektronik dapat dikategorikan sebagai

perjanjian untuk melakukan pekerjaan atau untuk **melakukan jasa – jasa**, yang terikat pada ketentuan Hukum Perdata dan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perlindungan Konsumen.

3. Tanggung Jawab Perdata Biro Perjalanan Wisata terhadap Wisatawan terikat pada Pasal 1365, 1366, 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam melaksanakan kegiatan wisata yang sudah disepakati atau diperjanjikan kedua belah pihak. Selain itu, juga dapat digugat tuntutan ganti rugi, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, apabila paket wisata dan pelayanan perjalanan wisatanya tidak sesuai dengan yang dijanjikan dan atau melanggar kewajiban Biro Perjalanan Konsumen sebagai Pelaku Usaha Perjalanan Wisata.

B. Saran

1. Biro Perjalanan Wisata yang ada di kota Pontianak disarankan untuk meningkatkan perannya dalam membangun kepariwisataan di Kota Pontianak, terutama yang terkait dengan fungsi pelayanan jasa wisata yang ditawarkannya kepada Wisatawan Domestik maupun Mancanegara.
2. Selanjutnya kepada Wisatawan, khususnya warga kota Pontianak dan sekitarnya, disarankan untuk senantiasa pro aktif berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan dengan ikut serta memelihara kebersihan, keamanan, ketertiban umum, dan pengembangan nilai-nilai budaya masyarakat kota Pontianak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, 1992, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- A.J. Mulyadi, 2009, *Kepariwisata dan Perjalanan*, Jakarta, Rajawali Pers.
- A. Qirom Syamsudin Meliala, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Dan Perkembangannnya*, Cetakan 1, Yogyakarta, Liberty.
- A.Z. Nasution, 1995, *Konsumen Dan Hukum*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- _____, 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen : Suatu Pengantar*, Cetakan 2, Jakarta, Diadit media.
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana.
- Chatamarrasjid Ais, 2003, *Badan Hukum Yayasan Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum Sosial*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Chidir Ali, 1999, *Badan Hukum*, Bandung, PT. Alumni.
- Coralie Bryant dan Loise G. White, 1989, *Management Pembangunan Untuk Negara Berkembang*, Jakarta, LP3ES.
- Gamal Suwanto, 1997, *Dasar-Dasar Pariwisata*, Jakarta, Andi Publishing.
- I Gde Pitana dan I Ketut Surya Diarta, 2009, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Yogyakarta, Andi Publishing.
- Ismayanti, 2011, *Pengantar Pariwisata*, Jakarta, Grasindo.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta, Konstitusi Press.

Kusudianto Hadinoto, 1996, *Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata*, Jakarta, UI Press.

Marpaung, Happy dan Bahar Herman, 2002, *Pengantar Pariwisata*, Bandung, Penerbit Alfabeta.

Muhammad Kesrul, 2003, *Penyelenggara Operasi Perjalanan Wisata*, Jakarta, Grasindo.

Munir Fuady, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan 1, Bandung, Citra Aditya Bakti.

_____, 2003, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Penerbit Alumni.

Oka A. Yoeti, 1996, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Bandung, Cetakan Revisi, Angkasa.

Pendit.Nyoman S. 1999, *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita.

R.G. Soekadijo S. 2000, *Anatomi Pariwisata (Memahami Pariwisata sebagai Systemic Linkage)*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Umum.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Kelima, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Salim, 2004, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cetakan II, Jakarta, Sinar Grafika.

Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Pers.

Soekadijo.R.G. 1997, *Anatomi Pariwisata*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, Editor : Ifdhal Kasim et.al., Jakarta, Elsam dan Huma.

Sutan Remy Sjandeni, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan*

Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia, Jakarta, Institut Bankir Indonesia.

Suwantoro.Gamal, 1997, *Dasar-dasar Pariwisata*, Yogyakarta, Andi.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025.

Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor: PM.85/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata.

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Perizinan Usaha Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata.

Keputusan Walikota Pontianak Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Perizinan Di Bidang Usaha Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata.

C. Jurnal, Artikel, Makalah, Internet, dan Sumber Lainnya

endah-parwis-.web.unair.ac.id/artikel_detail-7008, *Sejarah Perkembangan Pariwisata*, Unair, 26 Desember 2012, Diakses 5 Mei 2013.

Mansaur Fakih, *Tradisi dan Pembangunan Suatu Tinjauan Kritis*, Dimuat Dalam Majalah CSIS, Tahun XXIV, Nomor 6, 1985, Jakarta.

Syamsiah Badruddin, *Teori dan Indikator Pembangunan*, Artikel, 19 Maret 2009, wordpress.com. Diakses 5 Agustus 2012.

rafansdetik.blogdetik.com/.../ilmu-pengetahuan-pariwisata, ...30 April 2012, Diakses 23 November 2012.

ilmukepariwisataan.blogspot.com/.../definisi-wisatawan, 9 September 2011, Diakses 23 November 2012.

tour.seruu.com/.../kurang-promosi-potensi-wisata, 21 September 2011, Diakses Januari 2013.